

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENURUNAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Maisanti¹, Jariah Abu Bakar², Jalilah^{3*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

²Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Malikulsaleh, ³Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: 180604067@student.ar-raniry.ac.id, jariah@unimal.ac.id, jalilah@ar-raniry.ac.id*

ABSTRACT

Eradicating poverty by developing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) has quite large potential, considering that MSMEs are the sector that has made the biggest contribution to the development of labor absorption in Indonesia. The existence of MSME subsidies is one of the government's policies in order to reduce poverty. This research aims to determine the influence of MSMEs and subsidies on reducing poverty in Indonesia. This research is quantitative research using secondary data in the form of time series data from 1998-2021 using multiple linear regression analysis. The research results show that MSMEs partially have a negative and significant effect on poverty in Indonesia, while subsidy spending has a negative and insignificant effect on poverty in Indonesia, and simultaneously has a positive and significant effect on the Poverty variable.

KEYWORDS: *Micro, Small and Medium Enterprises, Subsidies, and Poverty*

ABSTRAK

Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang cukup besar, mengingat bahwa UMKM ini merupakan sektor yang paling memiliki kontribusi besar bagi perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Adanya subsidi Umkm merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh UMKM dan Subsidi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data time series dari tahun 1998-2021 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, sementara pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan

KATA KUNCI: *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Subsidi, dan Kemiskinan*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang tidak pernah habis dibicarakan oleh negara-negara yang sedang berkembang, misalnya Indonesia. Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya perbedaan antar daerah dan kelompok masyarakat yang disebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat atas dan masyarakat bawah di Indonesia semakin meluas. Pemerintah sendiri selalu merancang upaya penanggulangan kemiskinan dari

Maisanti, Jariah, Jalilah | Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penurunan Kemiskinan...

tahun ketahun, namun tingkat kemiskinan di Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan.

Efektifitas kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah memainkan peran penting dalam generasi kemiskinan. Bantuan sosial dari era ke era, dari tahun ke tahun masih menjadi alternatif pengambil kebijakan di bidang kemiskinan. Walaupun, bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin belum menghasilkan penanggulangan kemiskinan yang signifikan (Saragih, 2015). Orang miskin masih dijadikan sebagai objek penerima bantuan sehingga membuat mereka tidak akan kreatif dalam memproduksi hanya menerima bantuan dari pemerintah. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari kebijakan sosial. Misalnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat kurang mampu atau miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar (seperti pendidikan dan kesehatan), pengembangan UMKM serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya (Tisniwati, 2012).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sangat banyak digeluti oleh masyarakat dan telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Vina, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa Dunia Usaha di Indonesia dibagi menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Usaha mikro secara definitif adalah usaha milik perseorangan sementara usaha besar adalah usaha yang lebih besar daripada usaha menengah (Abduh, 2017).

Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang cukup baik dalam membantu penurunan angka kemiskinan di Indonesia, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30% (Darminto, 2015). Penyerapan tenaga kerja tersebut berperan penting dalam mengatasi masalah pengangguran, dimana tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan (Nurul, 2019). Awal penerapan kebijakan UMKM sampai sekarang secara keseluruhan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik seiring berganti tahun yang ditandai

jumlah UMKM mencapai angka 63 juta dan secara persentase jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Hal tersebut menyatakan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi negara (Hemas, 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkeu, 2021). Dimana, APBN membiayai UMKM salah satunya dengan pemberian subsidi dengan arah kebijakan untuk mempertahankan stabilitas harga pokok pangan, menjaga daya beli masyarakat miskin, menjaga pasokan kebutuhan pangan, dan meningkatkan daya saing produksi dan permodalan para UMKM menjadi lebih meningkat (Indonesia, APBN 2015). Artinya subsidi juga menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dimana subsidi dijadikan instrumen kebijakan penting yang diadopsi oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan (Wahyu, 2018).

Kebijakan anggaran subsidi diarahkan melalui kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, yaitu melalui pengendalian besaran subsidi energi dan subsidi non energi serta menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi subsidi tepat sasaran (Munawar, 2013). Selanjutnya, keberadaan subsidi mendukung Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi selama pandemi. Bentuk subsidi bisa Materi, Uang, Kebutuhan sembako, Barang hingga keringanan biaya. Biasanya, golongan yang menjadi penerima subsidi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Subsidi yang diberikan pemerintah ini bersumber dari pajak. Jadi, uang pajak yang dipungut oleh pemerintah kembali lagi ke dalam lingkup masyarakat melalui pemberian subsidi (Anugrah, 2022).

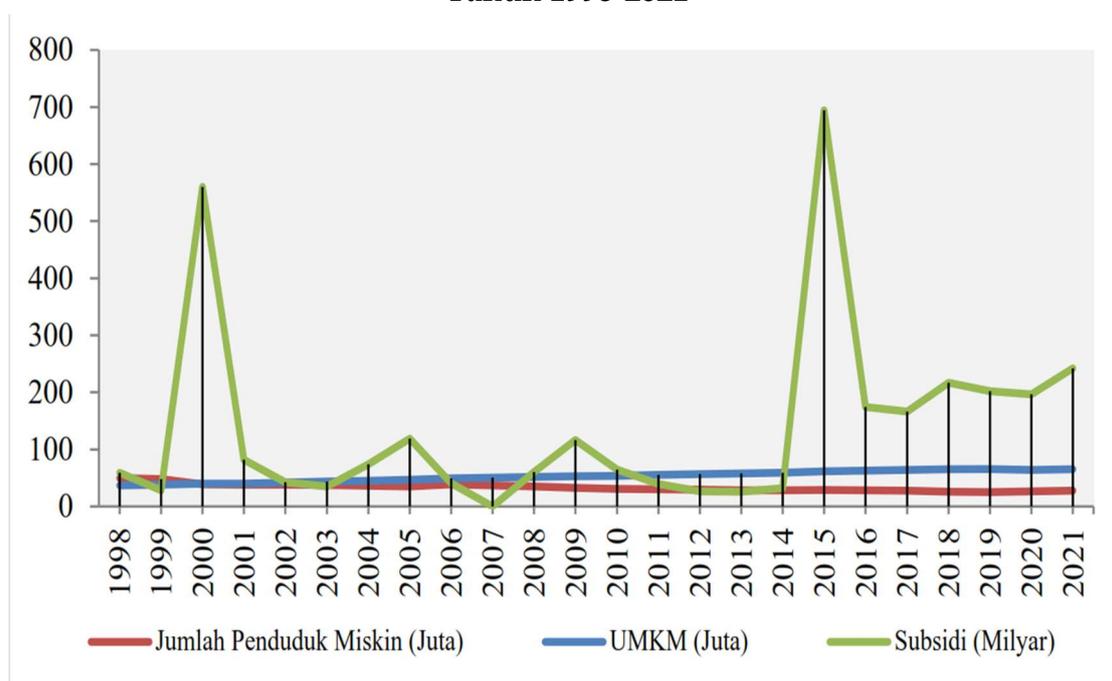
Perubahan besaran nilai subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa saja terjadi karena disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari masyarakat. Seperti pada tahun 2020 tercatat biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak Rp. 192 triliun yang terbagi atas Rp. 96,4 Triliun untuk subsidi energi dan Rp. 95,6 Triliun untuk subsidi nonenergi dengan tingkat pertumbuhan -4,8% yang menandakan penurunan anggaran pendanaan terhadap biaya subsidi (Indonesia APBN, 2020) sedangkan di tahun 2021 biaya yang dikeluarkan pemerintah sebanyak Rp. 175,4 Triliun dimana Rp. 64,8 Triliun alokasi subsidi energi dan Rp. 110,5 subsidi nonenergi dengan tingkat pertumbuhan -8,7% (Indonesia, Informasi APBN, 2021).

Subsidi diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau purchasing power (kemampuan masyarakat untuk membeli) adalah kekuatan uang atau jumlah barang yang dapat dibeli oleh seorang individu dengan jumlah

uang tertentu. Banyak pertimbangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar penganggaran yang diberikan untuk subsidi dapat memenuhi target subsidi dengan memperhatikan kemampuan finansial yang dimiliki oleh negara (Anugrah, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2015) menunjukkan bahwa UMKM sebagai bagian dari perekonomian juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi. Keunggulan bersaing berbasis inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu lebih panjang. Pemberian subsidi untuk membangun suatu UMKM ini dapat menuntaskan permasalahan angka kemiskinan di Indonesia. Berikut grafik jumlah UMKM, subsidi dan penduduk miskin tahun 1998-2021 di Indonesia:

Gambar 1. Grafik Jumlah UMKM, Subsidi, dan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1998-2021



Sumber: BPS yang diolah dari survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022

Gambar 1.4 menjelaskan jumlah subsidi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM), dan penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1998 sampai 2021. Terlihat bahwa dari ketiga jumlah ini UMKM yang semakin bertambah setiap tahunnya mempengaruhi angka penduduk miskin. Walaupun jumlah subsidi yang dikeluarkan setiap tahun tidak stabil artinya ada tahun yang subsidi yang dikeluarkan banyak dan ada tahun subsidi yang dikeluarkan lebih sedikit tidak akan mempengaruhi jumlah UMKM yang ada saat ini. karena

subsidi yang dilakukan oleh pemerintah itu mengarah ke UMKM maka akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan, melihat tingkat UMKM ini semakin tinggi menunjukkan bahwa ada bagian dari subsidi memang dialokasikan untuk UMKM sehingga membantu menurunnya tingkat kemiskinan.

Subsidi yang diberikan ke masyarakat ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengembangkan UMKM sekarang ini. Hasil penelitian oleh Sugiri (2020) mengatakan bahwa memetakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM serta memetakan strategi jangka pendek dan panjang yang diperlukan sebagai pelengkap kebijakan tersebut dan perlu dukungan agar menjaga kesinambungan UMKM sebagai salah satu pelaku perekonomian Indonesia sehingga sesuai dengan hasil penelitian Handayani (2015) yang menyimpulkan bahwa perekonomian yang bertambah akan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga dapat menyerap tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan

2. TINJAUAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan memiliki berbagai makna, dalam arti sempit, kemiskinan dapat didefinisikan keadaan seseorang yang tidak memiliki uang dan barang untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Kemiskinan dalam Kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata "miskin", yang diartikan tidak memiliki harta benda dan berpenghasilan rendah (Departemen Pendidikan, 2008). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan departemen sosial, kemiskinan merupakan tidak mampunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar atau primer seperti kebutuhan untuk makan dan minum. Orang atau masyarakat dikatakan miskin, jika pendapatan atau penghasilan yang ia terima dalam satu bulan tidak sampai rata-rata pendapatan penduduk, atau pendapatan setiap bulannya di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Menurut John Friedman kemiskinan adalah terjadinya kekuasaan sosial yang tidak seimbang. Kekuasaan sosial dikategorikan menjadi 5 bagian; pertama, memiliki modal yang berkembang seperti, tanah perumahan, perlengkapan dan kesehatan. Kedua, memiliki sumber pendapatan contohnya, mendapat pinjaman yang mencukupi. Ketiga, kelompok sosial dalam berpolitik, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan bersama. Keempat, memiliki jaringan yang luas, jaringan yang luas akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau barang-barang yang dibutuhkan. Kelima, mempunyai informasi tentang kondisi sekitar yang bermanfaat untuk bertahan hidup (Mujahidin dan

Mahardika, 2017). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang ternyata bisa berdampak serius, menurut Widyastuti (2021) penyebab kemiskinan meliputi faktor eksternal maupun internal sebagai berikut:

- a. Faktor eksternal diartikan sebagai faktor penyebab kemiskinan yang berasal dari luar pribadi seseorang. Contohnya pandemi, iklim yang berubah, kehidupan sosial dan kebijakan pemerintah.
- b. Faktor internal merupakan penyebab kemiskinan yang bersumber dari dalam pribadi seseorang, seperti keterbatasan fisik, bodoh, malas dan sebagainya.

Menurut Bank Dunia (2007) terdapat beberapa korelasi atau hubungan yang menyebabkan miskin: Pendidikan, pekerjaan, gender, akses pelayanan dan infrastruktur dasar. Sedangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Nugroho (2020) semakin banyak anggota keluarga yang tidak memiliki pendapatan akan menimbulkan kemiskinan dikarenakan tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kemiskinan juga dipengaruhi oleh banyaknya anggota keluarga yang tidak bekerja dapat menambah beban hidup yang harus di cukupkan.

Masa Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah pada masa itu telah memberikan perhatian pada kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia) Pasal

34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 berisi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Dan Pasal 27 ayat (2) berisi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang diantaranya bidang sosial, Bidang ekonomi, bidang agama dan melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan implikasi dari pembagian/kriteria usaha dalam konteks di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat kriteria tersebut akan memberikan dampak pada penentuan kebijakan usaha yang terkait. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut (Rizky, 2012), Usaha mikro merupakan usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usaha yang dilakukan sering berganti-ganti, lokasi usaha yang terkadang kurang tetap, umumnya tidak dilayani oleh perbankan, dan tidak banyak yang memiliki legalitas usaha. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu,

kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, ditengah derasnya ada kekuatan eksternal yang memang cenderung menggilas usaha kecil (Masudi, 2021).

Subsidi

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga (masyarakat) dengan tujuan agar pemberian subsidi ini dapat mendorong produksi/konsumsi yang lebih tinggi atau mendorong harga menjadi lebih rendah. Pemberian subsidi ini difokuskan agar dapat membantu masyarakat miskin yang terbatas untuk melakukan kegiatan perekonomian. Subsidi dibedakan menjadi dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (cash transfer) dan subsidi dalam bentuk barang (in kind subsidy). Subsidi dalam bentuk uang adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang. Keunggulan subsidi dalam bentuk uang kepada konsumen adalah lebih murah bagi pemerintah daripada subsidi dalam bentuk penurunan harga dan memberikan kebebasan dalam membelanjakannya. Sedangkan subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu, yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran di bawah harga pasar.

Bentuk dari Subsidi yaitu Profit Loss dan Cost Loss. Bentuk tersebut sebagai biaya yang dikeluarkan untuk menutupi perbedaan dalam harga jual atau manfaat yang diberikan oleh produk dengan harga pokok atau biaya yang harus dikeluarkan dalam menghasilkan produksi tersebut. Jadi, subsidi dalam bentuk Profit Loss adalah bentuk penyamaan harga jual dan harga pokok untuk menutupi selisih dari untung dan rugi bagi produsen. Sedangkan pada Cost Loss, harga jual tidak berdasarkan pada harga pokok melainkan menggunakan harga pasar dimana selisih antara harga pasar dan harga jual menjadi biaya

yang harus ditanggung. (Wardana, 2020). Dalam memberlakukan subsidi, adapun dampak positif atau manfaat yang diperoleh:

- a. Meningkatkan kemampuan ekonomi, dengan adanya subsidi objek subsidi dapat mengalami penurunan dalam harga dibawah atau setara dengan harga keseimbangannya yang mana akan menjaga daya beli masyarakat.
- b. Jika subsidi ditujukan untuk masyarakat yang berekonomi bawah atau tidak mampu, tentunya akan membantu mereka memenuhi kebutuhan ekonominya dengan harapan ekonomi mereka akan secara bertahap membaik.
- c. Di sisi pelaku usaha, subsidi dapat mencegah kebangkrutan usaha mereka karena subsidi harus tetap memandang keseimbangan pasar dan meningkatkan kualitas ekonominya di atas daya saing dari produk usaha dari luar negeri.

Sedangkan dampak negatif dari adanya subsidi ialah :

- a. Adanya kecenderungan ketika konsumen dapat membayar atas produk yang disubsidi dibawah harga pasarnya, mereka akan melakukan pengeluaran berlebihan ketimbang berhemat akan kenikmatan yang diterimanya. Jika ini tidak diregulasi, subsidi akan menyebabkan ketidak efisienan dalam distribusinya.
- b. Penyimpangan harga, subsidi dapat menimbulkan penyimpangan harga karena subsidi hanya bertujuan untuk program populis saja tanpa melihat efisiensinya, target subsidi atau orang yang berhak mendapatkan subsidi berpotensi tidak dapat menikmatinya.
- c. Mengganggu jalannya mekanisme pasar, dikarenakan subsidi memerlukan biaya ekonomi yang sangat besar dan juga melumpuhkan pasar persaingan yang akan merugikan pihak swasta (Ibnu, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan menggunakan buku bacaan sebagai landasan utama dalam penelitian ini, dengan mengkaji buku-buku, dokumen, dan situs website yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sementara analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan secara objektif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif melalui data sekunder, yaitu data yang dihimpun dari Lembaga-lembaga pemerintah atau

swasta baik secara langsung ataupun tidak langsung (Ridwan, 2020). Penelitian ini menggunakan data time series yang berbentuk tahunan dengan periode waktu dari tahun 1998 hingga tahun 2021. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah UMKM, dan Jumlah Subsidi umkm di Indonesia dari periode tahun 1998-2021 (24 tahun). Data yang diperoleh bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu Jumlah Unit UMKM (X_1) dan Jumlah Subsidi Umkm (X_2) terhadap variabel terikat yaitu Kemiskinan (Y). Dalam analisis ini menggunakan bantuan program Eviews. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah ada masalah didalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan kedua variabel tersebut. Model asumsi klasik digunakan karena penelitian ini menggunakan analisa regresi. Model asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Uji Multikolinieritas bermaksud melihat atau menguji suatu model regresi apakah terdapat korelasi atau hubungan sempurna antara variabel independen dalam persamaan regresi. Model regresi yang baik harusnya tidak memiliki korelasi diantara variabel independen. Cara menemukan adanya multikoliniertitas dengan melakukan: Jika nilai koefisien korelasi $< 0,80$ maka tidak terjadi masalah multikolikolinieritas. Dan Jika nilai koefisien korelasi $> 0,80$ maka terjadi masalah multikolikolinieritas.
- b. Uji Heteroskedastisitas, berarti varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak acak (random) tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas untuk semua pengamatan sama maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terjadihomoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika P-Value $> \alpha$ (5%) maka tidak terjadi

- masalah Heteroskedastisitas dan Jika $P\text{-Value} < \alpha$ (5%) maka terjadi masalah Heteroskedastisitas
- c. Uji Autokorelasi, bertujuan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t (saat ini) dengan residual periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dengan menggunakan uji LM dimana dasar pengambilan keputusan dengan kriteria jika $\text{Prob. Chi-square} > \alpha$ (5%) maka tidak terjadi masalah autokorelasi dan jika $\text{Prob. Chi-square} < \alpha$ (5%) maka terjadi masalah autokorelasi

Pengujian Hipotesis

- a. Uji Hipotesis Parsial (Uji T), bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel dependen lainnya dianggap konstan (tetap). Uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai t -statistik dengan nilai t -tabel, dimana : (1) Jika nilai t -hitung $>$ t -tabel dengan nilai signifikansi α (0.05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). (2) Jika nilai t -hitung $<$ t -tabel dengan nilai signifikansi α (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).
- b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F), Uji statistik F digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen, dengan cara membandingkan antara nilai F -hitung dengan nilai F -tabel dimana: (1) Jika nilai F -hitung $>$ F -tabel dengan nilai signifikansi α (0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara bersama- sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai F -hitung $<$ F -tabel dengan nilai signifikansi α (0,05) maka H_0 ditolak H_a diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- c. Koefisien Determinasi R^2 , merupakan indikator yang berguna untuk menjelaskan besarnya variasi dalam model dan bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan suatu model dalam menjelaskan variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi mendekati 1, artinya variabel bebas (independen) dapat menjelaskan variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi mendekati 0, maka variabel bebas (independen) hanya sedikit menjelaskan variabel terikat (dependen).

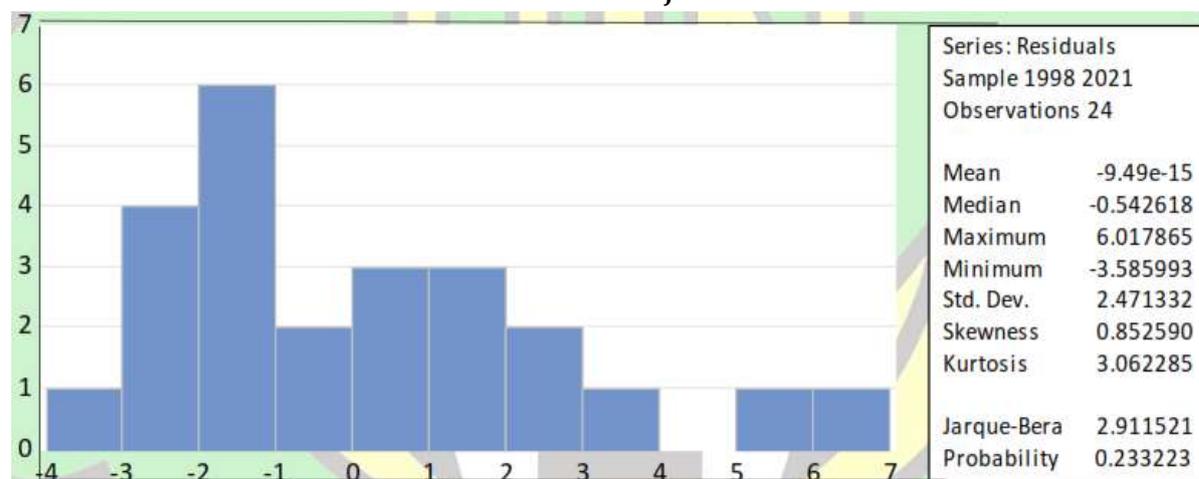
Dari nilai R² kita bisa mengetahui tingkat signifikansi suatu hubungan diantara variabel bebas dan variabel tak bebas dalam regresi linier.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas, pada penelitian uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Berikut hasil uji normalitas:

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Berdasarkan Gambar 4.5 menunjukkan bahwa nilai Jarque Bera dalam grafik sebesar 2,911 dengan probabilitas sebesar 0,233 artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi (5%) yaitu $0,233 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik variabel bebas maupun variabel terikat dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, maka data dalam penelitian ini secara residual berdistribusi normal dan layak digunakan.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.1. Hasil Uji Multikolinieritas

	UMKM	S
UMKM	1.000000	0.238878
S	0.238878	1.000000

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel independen dibawah 0,80. Dimana, nilai untuk varibel UMKM (X1) dan Subsidi (X2) sebesar $0,238878 <$

0,80 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Glejser Test

F-statistic	0.451029	Prob. F (2.20)	0.6433
Obs*R-squared	0.992597	Prob. Chi-Square (2)	0.6088
Scaled explained SS	0.958118	Prob. Chi-Square (2)	0.6194

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diketahui hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser menunjukkan hasil P-value Obs*R-squared sebesar $0,6088 > 0,05$ (5%), artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.3. Hasil Uji Autokorelasi – Serial Correlation LM Test

F-statistic	0.791571	Prob. F (2.20)	0.4683
Obs*R-squared	1.859368	Prob. Chi-Square (2)	0.3947

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas diketahui hasil uji autokorelasi menggunakan uji LM menunjukkan hasil Prob. Chi-square sebesar $0,3947 > 0,05$ (5%), artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi dalam penelitian.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan pengaruh dua variabel independen atau lebih (dalam penelitian UMKM dan Subsidi) terhadap satu variabel dependen (Kemiskinan), dimana apakah terdapat hubungan fungsional antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Berikut hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 4.4. Hasil Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	66.69535	3.003777	22.20383	0.0000

UMKM	-0.629750	0.057473	-10.95727	0.0000
S	-0.000546	0.003358	-0.162614	0.8724

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil penelitian di atas dalam bentuk persamaan model regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$K = 66.69535 - 0.629750UMKM - 0.000546S + \varepsilon$$

Keterangan:

K : Kemiskinan

UMKM : Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

S : Jumlah Subsidi

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.4 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 66.695 artinya pengaruh kemiskinan di Indonesia sebesar 66.695 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
2. Nilai koefisien regresi variabel UMKM (X1) sebesar -0.629 artinya jika setiap penambahan jumlah UMKM sebesar 1 juta, maka akan menurunkan kemiskinan di Indonesia sebesar 0.629 juta dengan asumsi variabel lain tetap. Dimana jumlah UMKM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia selama periode 1998 -2021.
3. Nilai koefisien regresi Subsidi (X2) sebesar -0.0005 artinya jika setiap penambahan penyaluran dana subsidi sebesar 1 miliar maka akan menurunkan kemiskinan di Indonesia sebesar 0,0005 dengan asumsi variabel lain tetap. Dimana subsidi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia selama periode 1998 -2021.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Hipotesis Parsial (Uji T), Uji ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu UMKM dan subsidi terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Kriteria pengujian dengan membandingkan nilai t-hitung (t- statistik) dengan t-tabel. Berikut hasil uji parsial (uji t):

Tabel 4.5. Hasil Uji Parsial

Variable	t-Statistik	Prob.
C	22.20383	0.0000

UMKM	-10.95727	0.0000
S	-0.162614	0.8724

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengaruh UMKM (X1) terhadap Kemiskinan (Y)
Diketahui bahwa variabel UMKM (X1) memperoleh nilai t-hitung sebesar 10,957 dan t-tabel sebesar 1,721 ($10,957 > 1,721$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (α) artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variabel UMKM (X1) dengan Kemiskinan (Y) di Indonesia selama periode 1998- 2021.
 - b. Pengaruh Subsidi (X2) terhadap Kemiskinan (Y). Diketahui bahwa variabel Subsidi (X2) memperoleh nilai t-hitung sebesar 0,162 dan t-tabel sebesar 1,721 ($0,162 < 1,721$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,872 > 0,05$ (α) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Subsidi (X2) dengan Kemiskinan (Y) di Indonesia selama periode 1998 - 2021.
2. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F). Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh dari seluruh variabel independen yaitu UMKM dan Subsidi secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Kemiskinan. Berikut tabel hasil uji simultan (uji F):

Tabel 4.6. Hasil Uji F

<i>F-statistic</i>	64.12910
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Pada Tabel 4.7 di atas diketahui nilai F-hitung sebesar 64,129 dan F- tabel sebesar 3,467 yang diperoleh dari $df_1 = k-1 = 3 -1 = 2$ dan $df_2 = n-k = 24 -3 = 21$ (dimana k adalah jumlah variabel bebas maupun variabel terikat dan n adalah jumlah sampel). Nilai F-hitung $>$ F-tabel ($64,129 > 3,467$) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka, H_0 diterima dan H_a ditolak artinya variabel UMKM (X1) dan Subsidi (X2) secara simultan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y).

Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini dilakukan untuk menjabarkan hingga sejauh mana persentase variasi variabel dependen pada model regresi yang dijabarkan oleh variabel independennya. Berikut tabel hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4.7. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.859304
Adjusted R-squared	0.845905

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Pada Tabel 4.7 di atas diperoleh nilai R-squared sebesar 0.859304 atau 85,93%, artinya model ini mampu menjelaskan pengaruh variabel UMKM dan Subsidi terhadap Kemiskinan sebesar 85,93%, Sementara sisanya sebesar 14,07% dijelaskan diluar model dalam penelitian.

Pembahasan Penelitian

a. Pengaruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Kemiskinan

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, artinya jumlah UMKM yang semakin cepat bertambah menjadi salah satu cara dalam mengentaskan tingkat kemiskinan di Indonesia. Peran UMKM sangat penting karena menjadi salah satu sektor ekonomi potensial dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat terutama golongan menengah kebawah karena dapat menyerap tenaga kerja. Melalui kewirausahaan UMKM dapat menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun karakter bangsa yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara secara simultan UMKM dan subsidi secara bersama- sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anugerah dan Nuraini (2021) yang menjelaskan secara parsial pertumbuhan UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan artinya UMKM menjadi peluang masyarakat untuk mendapat kesempatan kerja dan pendapatan keluarga diduga sangat efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, dimana para pemilik UMKM dapat menjalankan usahanya sekaligus dapat

memperkerjakan tenaga kerja maka dapat menurunkan angka kemiskinan serta dapat menciptakan kesejahteraan umum atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

b. Pengaruh Subsidi Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, artinya dana subsidi yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat dampaknya tidak terlalu besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran subsidi yang masih berfluktuatif naik turun dan hanya beberapa tahun saja pemerintah mengeluarkan dana subsidi yang besar untuk menjaga masyarakat miskin agar tetap mengakses terhadap pelayanan publik, pembangunan nasional dan sosial.

Selanjutnya, pengeluaran subsidi seharusnya mampu memberikan kontribusi terhadap kemiskinan, namun penyebab kurang optimalnya pengeluaran subsidi diduga karena pendistribusian yang kurang tepat sasaran. Artinya, pengeluaran subsidi masih belum adil secara merata, dimana subsidi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil merata namun pada faktanya subsidi lebih banyak diterima oleh masyarakat kelas menengah atas. Misalnya seperti subsidi listrik dan BBM banyak dikonsumsi masyarakat kelas ekonomi menengah atas karena memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan masyarakat miskin seperti motor, mobil dan rumah yang dapat mengkonsumsi listrik dan BBM yang lebih besar (Khairi dan Aidar, 2018). Keadaan tersebut menjelaskan bahwa terjadi kesenjangan sosial, dimana masyarakat yang mampu semakin banyak mengkonsumsi subsidi yang diberikan pemerintah sementara masyarakat miskin semakin sedikit dan hampir tidak ada dalam mengkonsumsi segala jenis subsidi dari pemerintah. Selain itu, subsidi masih banyak digunakan untuk menunjang UMKM agar daya saing produksi dan permodalan UMKM menjadi lebih meningkat. Sementara secara simultan UMKM dan subsidi secara Bersama Sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Puspari (2022) yang menjelaskan bahwa subsidi berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan namun tidak secara signifikan, menunjukkan bahwa pengeluaran subsidi cenderung menurun dan belum secara merata disalurkan kepada masyarakat miskin. Dimana, ketidaksesuaian antara target dengan alokasi anggaran menyebabkan penyaluran subsidi belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat menengah bawah.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Maisanti, Jariah, Jalilah | Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penurunan Kemiskinan...

Dari hasil analisis data dari keseluruhan data yang diperoleh maka diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara parsial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, artinya jumlah UMKM yang semakin cepat bertambah menjadi salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
2. Secara parsial pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, artinya dana subsidi yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat dampaknya tidak terlalu besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.

Saran

Pemerintah seharusnya tidak hanya memfokuskan pada UMKM saja untuk mengentaskan kemiskinan, namun harus juga di dukung dengan penyaluran subsidi yang berkesinambungan, Artinya dana subsidi disalurkan secara terpisah tidak disalurkan untuk kepentingan UMKM juga. Dengan demikian, semakin banyak subsidi yang disalurkan maka semakin nyata pula pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan. Adanya hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah melakukan upaya- upaya untuk mengembangkan program UMKM dan subsidi. Kedua variabel ini memiliki dampak positif yang besar Kemiskinan.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang merata serta membuka informasi seluas-luasnya bagi UMKM di Indonesia terhadap program- program dan pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan UMKM sehingga masyarakat mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran dengan mengikuti program-program yang dijalankan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Awalil Rizky, Strategi Jitu Investasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan (Jakarta: BMT Permodalan, 2012)
- Achmad Maqsudi. (2021). Pengertian UMKM Dan Pendaftaran Merek. Surabaya
- Anugrah Stephen Soen. DKK (2022). Subsidi di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi. 21(1): 84-92
- Baiq Tisniwati. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di
- Maisanti, Jariah, Jalilah** | Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penurunan Kemiskinan...

- Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 10(1): 33-46
- Darwanto, D., Raharjo, S. T., and Hendra, A. (2015). Pengembangan produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor pertanian berbasis potensi lokal. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*, 1(2).
- Dungtji Munawar (2013), Memahami pengertian dan Kebijakan subsidi dalam APBN, Kemenkeu
- Gunawan, H. M. (2014). Pemberdayaan Umkm dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Daerah: Sebuah Telaah Konsep.
- Hossain, S. (2007). Poverty and vulnerability in urban Bangladesh: the case of slumcommunities in Dhaka City. *International Journal of Development Issues*, 6(1), 50-62.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan, "Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan", Cet. 5, Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Liedholm, C., & Mead, D. (1988). Small-scale Enterprises: A Profil. *Economic Impact*, 63. 12-17.
- Muhammad Wahyu Khairi. (2018). Pengaruh Subsidi Energi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 3(3): 359-369
- Murdiyana & Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintah*. 10(1): 73-96
- Mudrajad Kuncoro, (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Megasari, Handayani. (2015). Analisis Perekonomian Dan Kemiskinan di Indonesia.
- Rukiah & Ulan. (2022). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*. 8(1): 73-86
- Saragih, I dan Nasution, S. (2015). Analisis Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 19(1):1-7.
- Suryahadi, Asep & Sudarno Sumarto. Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia. <http://www.smeru.or.id/news/et/2001/ed03/200103data.htm>..
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. (2014). Strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi pasar Bebas ASEAN. *Jurnal Keuangan & Moneter*, 16(1), 1-20.
- Vina Natasya & Pancawati Herdiningsih. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Journal of Economics and Business*. 5(1): 141-148
- Wardana, R. (2020, October 20). Pengertian Subsidi Dan Contoh Kebijakan Subsidi di Indonesia. Diambil kembali dari Lifepal: <https://lifepal.co.id/media/subsidi/>
- Maisanti, Jariah, Jalilah** | Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penurunan Kemiskinan...